



UPT Malioboro Sebut Tidak Tahu-menahu

Tudingan Jual Beli Lapak Dianggap Dinamika Pedagang

JOGJA - Tudingan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono adanya praktik jual beli lapak pedagang kaki lima (PKL) butuh pembuktian. Namun, upaya itu bakal menemui jalan terjal. Apalagi Kepala Unit Pelaksana Teknis Malioboro Ekwanto mengaku tak tahu-

menahu masalah tersebut. Sejauh ini UPT Malioboro tak pernah menerima laporan jual beli lapak di trotoar depan toko-toko sepanjang Jalan Malioboro.

Ekwanto tak menampik bahwa anggota PPMAY sering mendatangi kantornya. Namun dia memastikan tak sekalipun ada laporan soal jual beli lapak Malioboro. "Kami bahkan tak menarik pajak (retribusi) kepada para pedagang (PKL) di sana," ungkapnya kemarin (4/9) =

► Baca UPT... Hal 7

UPT Malioboro

Sebut Tidak Tahu-menahu

Sambungan dari hal 1

Ekwanto menyebut dugaan jual beli lapak lebih sebagai dinamika pedagang di kawasan pariwisata Kota Jogja itu.

Kendati demikian, Ekwanto menegaskan bahwa praktik jual beli lapak merupakan suatu pelanggaran. Terlebih terhadap pemilik lahan. "Seumpama ada (praktik jual beli lapak Red), itu bukan hak mereka (PKL). Tak boleh ada PKL menjual lahan di sana (Malioboro)," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Senin (3/9) anggota PPMAY mengadukan keresahan mereka akan keberadaan PKL Malioboro kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Sadana menyatakan adanya praktik jual beli lapak di trotoar dengan nilai cukup fantastis. Bahkan ada sepetak lapak dibanderol Rp 50 juta. Praktik tersebut bukan dilakukan PKL, melainkan juragan PKL yang "menguasai" banyak lapak.



ELANG KHARISMA DEWANOGAWADAR JOGJA

Mengenai penataan PKL, Ekwanto mengklaim, seluruh pedagang di kawasan Malioboro siap ditata. Bersama UPT Malioboro seluruh paguyuban PKL mendeklarasikan untuk tertib dan mau ditata. Termasuk mengatur ketinggian lapak agar tak menutupi toko di belakangnya.

Soal lebar dan ketinggian lapak, menurut Ekwanto, selalu diawasi

setiap hari oleh petugas UPT Malioboro. Dengan begitu, dia berharap para PKL mau ditata dan menata diri.

"Seumpama ada lapak menutupi toko, ya kami tegur. Supaya pemilik toko nyaman, sedangkan PKL tetap bisa berjualan di lahan depan toko tersebut," ucapnya.

Ekwanto memastikan, jika ada PKL melanggar isi deklarasi akan

diskors atau dijatuhi sanksi untuk mengangku dagangannya. Jika pelanggaran terus diulang, bukan tidak mungkin PKL uang bersangkutan dilarang berjualan lagi.

Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Ahmad Yani (Pelmani) Slamet Santoso menampik tuduhan praktik jual beli lapak. Dia mengklaim tak ada anggota Pelmani

MENUTUPI TOKO: Deretan lapak PKL di depan toko sepanjang Malioboro. Para pemilik toko merasa terganggu dengan keberadaan lapak-lapak tersebut.

yang melakukan praktik sewamenyewa lahan antarsama PKL untuk jualan. Namun, Slamet tak menampik ada kemungkinan PKL menyewa *space* kepada pemilik lahan untuk membuka lapak di depan toko. Dan kedua belah pihak sudah ada kesepakatan. Ihwal harga sewa lahan hingga

Rp 50 juta seperti disebutkan ketua PPMAY, Slamet mengaku tidak tahu.

Sementara soal ukuran lapak yang dirasa mengganggu pemilik toko, Slamet mengaku selalu berkoordinasi dengan pemilik toko terkait. "Dari awal kami sudah sepakat. Namun jika ada ang-

gota Pelmani yang dirasa mengganggu pemilik toko, kami akan dialog," katanya.

Slamet membenarkan jika selama ini tak pernah ada penarikan retribusi oleh UPT Malioboro. Uang yang mereka setorkan kepada pemerintah hanya untuk pungutan sampah. (ers/yog/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005